

KOMUNIKASI POLITIK PEREMPUAN DI KEDIRI

Citra Orwela

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

citraorwela@iainkediri.ac.id

Received May 18, 2023	Revised May 24, 2023	Accepted May 31, 2023
--------------------------	-------------------------	--------------------------

Abstract

The limited number of women involved in political activities, both local and national, is an exciting problem to be examined. Until now, research on women politicians and leadership has not been explored. Starting from these problems, the author wants to go deep into deep research on "Women's Political Communication in Kediri". This study took two informants of female politicians in Kediri. This research is a qualitative type which was conducted by the phenomenological paradigm with an interpretive approach. The results of this study found the importance of communication abilities and skills in the political field.

Keywords: *Communication, Politics, Gender, Kediri*

Abstrak

Terbatasnya perempuan yang berkecimpung dalam aktivitas politik baik lokal maupun nasional ini menjadi masalah yang menarik untuk diteliti. Hingga saat ini, penelitian terkait politisi perempuan dan kepemimpinan perempuan masih belum didalami. Berawal dari permasalahan tersebut, penulis ingin mengkaji permasalahan ini bentuk penelitian “Komunikasi Politik Perempuan Politisi di Kediri”. Penelitian ini mengambil informan dua politisi perempuan di wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigma fenomenologi dengan pendekatan interpretif. Hasil dalam penelitian ini menemukan pentingnya kemampuan dan skill komunikasi dalam politik praktis.

Kata kunci : Komunikasi, Politik, Gender, Kediri



PENDAHULUAN

Pasca lengsernya Orde Baru, perempuan di Indonesia secara perlahan mempunyai ruang lebih luas untuk berkecimpung dalam kegiatan-kegiatan publik dan politik. Pada masa Orde Baru, Soeharto mengembangkan kebijakan yang menempatkan dirinya sebagai figur Bapak Pembangunan. Pada masa tersebut, perempuan diarahkan untuk mengabdikan diri sebagai ibu maupun istri untuk mendukung program pembangunan yang dicanangkan. (Dewi, 2007) Perempuan diposisikan sebagai ibu dan istri pendamping suami sehingga segala kegiatan perempuan diarahkan pada aktivitas yang bersifat domestik.

Momentum reformasi pada tahun 1998 telah menggeser tatanan perempuan yang awalnya hanya menjadi subordinat menjadi subjek dalam kebijakan dan kegiatan politik. Megawati Soekarnoputri naik menjadi presiden pertama Republik Indonesia setelah lengsernya Abdurrahman Wahid. Namun, tentu saja keterlibatan perempuan dalam politik masih tergolong minim. Lingkungan politik praktis masih didominasi oleh laki-laki. Tuntutan untuk berani juga pandangan masyarakat yang masih minor terhadap kepemimpinan perempuan merupakan 'pekerjaan rumah' yang belum terselesaikan hingga sekarang.

Lovenduski, Campbell, & Sampson-Jacents (2002) menyebutkan rendahnya keterlibatan perempuan pada kegiatan politik praktis (legislatif maupun eksekutif) bisa dilihat dari banyak aspek. Dari beberapa literatur, setidaknya kita menemukan adanya 3 hambatan yaitu hambatan struktural, institusi politik, dan budaya politik (Syafputri, 2017). Hambatan struktural meliputi kebijakan-kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dalam bidang sosio-ekonomi.

Dalam pandangan penulis, hambatan struktural ini berpengaruh paling besar karena menciptakan *support system* untuk semakin luasnya perempuan bekerja dan berkarir dalam masyarakat tanpa bimbang memilih keluarga atau pekerjaan. Kebijakan yang mendukung misal, penyediaan *day care* gratis di lingkungan kerja hingga aturan cuti 6 bulan bagi ibu yang ingin memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Namun, kebijakan-kebijakan ramah perempuan ini hanya bisa diraih jika keterwakilan perempuan di legislatif sesuai standar angka kritis PBB, yaitu 30%.

Hasil pemilu 2019 menunjukkan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) masih minim. Target 30% belum tercapai. Perempuan yang melenggang sebagai anggota legislatif masih 20.8% atau hanya sekitar 120 perempuan (www.kemenpppa.go.id, 2021). 23 tahun reformasi telah bergulir, namun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan masih rendah.

Tidak hanya pada aktivitas politik level nasional, hal ini juga terjadi pada level daerah, termasuk di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Kehadiran perempuan sebagai salah satu penentu kebijakan dalam lingkup jabatan politisi masih rendah. Jumlah perempuan yang terjun dalam politik praktis masih terbatas. Ini tidak sebanding dengan jumlah laki-laki yang masih mendominasi ruang-ruang politik.

Pada Pilkada Kabupaten Kediri 2020, Dewi Marya Ulfa, wakil bupati terpilih merupakan seorang perempuan. Latar belakangnya sebagai aktivis pada salah satu lembaga banom (Badan Otonom) Nahdhatul Ulama dianggap sebagai poin yang menguatkan. Namun, yang perlu digarisbawahi, Bupati Kediri sebelumnya juga perempuan yang berangkat dari sistem oligarki kekerabatan. Haryanti Sutrisno merupakan istri dari mantan bupati, H. Sutrisno.

Profil Dewi Mariya Ulfa, wakil bupati Kediri terpilih, yang berangkat dari keluarga biasa juga patut menjadi perhatian. Selama ini, ada kecenderungan bahwa perempuan yang terjun ke dunia politik berangkat dari lingkaran keluarga yang politisi. Pandangan ini diperkuat dengan dominasi perempuan ‘bernasab’ politik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan legislatif (pileg) di tingkat nasional, wilayah hingga lokal.

Terbatasnya perempuan yang berkecimpung dalam aktivitas politik baik lokal maupun nasional ini menjadi masalah yang menarik untuk diteliti. Hingga saat ini, penelitian terkait politisi perempuan hingga kepemimpinan perempuan masih jarang ada. Beberapa artikel terkait gender dan aktivisme politik ditulis oleh salah satu peneliti dari LIPI yaitu Kurniawati Hastati Dewi. Hasil penelitiannya menjadi rujukan penulis. Pada tulisannya yang terakhir pada tahun 2018, *Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung*, Kurniawati Hastati menyampaikan bahwa dalam pergerakan perempuan di politik sangat dibutuhkan campur tangan laki-laki. (Dewi et al., 2018)

Penelitian tersebut mengambil sampel bupati Grobogan dan bupati Lampung Timur. Kiprah dan pergerakan politik dari 2 politisi perempuan yaitu Sri Sumarni dan Chusnunia Halim dijadikan subjek penelitian. Dalam penelitiannya, Kurniawati menemukan bahwa para pemain di belakang layar yang mengatur figur perempuan agar tampil sebagai politisi ini didominasi oleh laki-laki.

Partisipasi politik perempuan yang masih rendah jumlahnya menyebabkan rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Padahal, keterwakilan perempuan belum terdengar sepenuhnya di ruang publik. Peneliti mengkaji partisipasi politik dan

komunikasi perempuan di wilayah politik di Indonesia dengan menitikberatkan pada aspek partisipasi perempuan dalam politik di lembaga formal relatif rendah dan bagaimana peran komunikasi dalam hal itu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mewawancarai 18 anggota legislatif perempuan di DPR RI. Dalam penelitian ini menunjukkan minimnya partisipasi perempuan sebagai representatif karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Di antaranya keengganan perempuan untuk terjun langsung ke dunia politik praktis, faktor budaya patriarki, dan ketidakmampuan perempuan untuk menyelesaikan banyak masalah nyata. (Parwati & Istiningdiah, 2021).

Erfina Nurussa'adah dalam artikelnya Perempuan Dan Komunikasi Politik Pada Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan bahwa Perempuan memiliki citra sebagai makhluk yang lemah di masyarakat sehingga dianggap tidak pantas terjun ke politik praktis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam komunikasi politik pada pemilihan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal dan pendekatan fenomenologis dengan menggunakan teori standpoint Sandra Harding dan Julian T. Wood. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa terdapat partisipasi politik perempuan dalam komunikasi politik di DIY, perempuan sebagai media penghubung ke masyarakat dan juga menjembatani kepentingan perempuan secara khusus serta umum, dan faktor Internal maupun eksternal mempengaruhi keterwakilan perempuan. (JH Lotulung, 2018)

Riset di kota berbeda menunjukkan bahwa faktor utama penentu layak atau tidaknya seseorang dipilih menjadi kepala daerah adalah karakter, prestasi dan pendekatannya terhadap masyarakat, bukan dari soal dari jalur pencalonan mana dia berasal. Evie Ariadne Shinta Dewi menuliskan dalam risetnya terkait tingginya antusiasme masyarakat kota Bandung yang tinggi terhadap pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan tanpa melihat jenis kelaminnya. Metode fenomenologi dan wawancara terhadap 10 pemilih aktif digunakan dalam penelitian ini dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa informan memaknai keberadaan calon dari jalur perseorangan sebagai bentuk perwujudan demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. (Ariadne, 2018)

Menurut Zamroni, perempuan menjadi porsi terbesar dalam pemberian suara di pemilihan umum. Namun, jumlah ini tidak sejalan dengan kuantitas perempuan yang menduduki jabatan strategis di politik praktis. Melalui komunikasi, kaum perempuan berusaha masuk pada sistem politik seperti partai politik ataupun lembaga legislatif sehingga mampu meraih posisi

strategis di dalamnya. Kondisi ini ditelaah melalui kajian komunikasi politik dan gender. (Mohammad Zamroni, 2013)

Dominasi laki-laki dalam ranah politik praktis, secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada pola komunikasi politik yang dibangun oleh kedua politisi tersebut. Bermula dari hasil penelitian tersebut, penulis ingin mengkaji permasalahan ini lebih mendalam dalam bentuk penelitian "*Komunikasi Politik Perempuan Politisi di Kediri*". Penelitian ini akan mengambil informan di wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Penelitian ini mencakup mengenai bagaimana komunikasi politik para perempuan politisi dalam lingkungan politik yang didominasi laki-laki serta apa saja bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh perempuan politisi dalam mendekati konstituennya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dan pengambilan data utama melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*) kepada 2 perempuan politisi di Kediri. Taylor dalam Moleong memaparkan bahwa metodologi kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data bisa didapatkan melalui kata-kata tertulis, lisan dengan wawancara serta pengamatan terhadap perilaku yang ada. (Lexy J. Moleong, 2018)

Peneliti ingin memahami secara mendalam mengenai fenomena rendahnya angka politisi perempuan di masyarakat dengan melihat pola perilaku politisi perempuan tersebut sebagai salah satu aktor sosial didalam masyarakat. (Nindito, 2013). Penelitian menggunakan menggunakan teori *standpoint* untuk menganalisis temuan dan pengamatan yang telah dilakukan dalam wawancara sehingga bisa mengeksplorasi secara detail mengenai aspek pengalaman para perempuan politisi di Kediri dalam melakukan aktivitas komunikasi politik yang dilakukannya, baik sebagai anggota DPRD maupun Wakil Bupati. (Nindito, 2013)

Teori Standpoint memungkinkan untuk melihat serta menilai segala sesuatu di dunia sekeliling kita. Menurut Sandra Harding dan Julia Wood, kelompok-kelompok sosial yang terbentuk dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan dari anggotanya. Rekonstruksi gender merupakan buah dari konstruksi sosial dan kultural, tidak hanya sekedar simbol biologis. Pengalaman dan memori individu dalam kelompok sosial dilihat dari berbagai sudut pandang baik dari sudut pandanga yang mengalami hingga orang yang berkuasa. (Littlejohn, 2008). Melalui teori ini, individu dipandang sebagai

subjek yang aktif yang realitas dan perspektifnya merupakan sumber informasi. (West, 2010)

Teori *Standpoint* didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: 1) pengetahuan merupakan produk dari kegiatan sosial sehingga tidak ada pengetahuan yang bersifat objektif. 2) Kondisi budaya disekeliling kehidupan wanita akan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang menimbulkan perbedaan pola komunikasi. 3) Pemahaman terhadap perbedaan pola komunikasi dan pengalaman wanita akan berguna untuk memahami ciri khasnya. 4) Kita bisa memahami pengalaman wanita dengan melihat interpretasi wanita akan pengalaman mereka. (West, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi Politik

Kantaprawira dalam bukunya yang berjudul *Sistem Politik Indonesia- Suatu Model Pengantar* mengemukakan pendapat Gabriel Almond terkait relasi struktur politis dan komunikasi politik yang tidak terpisahkan. Almond menjelaskan, struktur politik yang meliputi infra struktur politik (masyarakat/rakyat/publik, suasana kehidupan politik masyarakat/rakyat/publik, sektor politik: masyarakat/rakyat/publik) dan supra struktur politik (struktur politik pemerintahan, sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik: pemerintahan) membutuhkan komunikasi untuk bisa berjalan dengan baik atas peran-peran lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Kantaprawira, 1977)

Dalam bahasan mengenai politik, tidak mungkin kita mengabaikan proses komunikasi yang terjadi didalamnya. Para tokoh memberikan bermacam definisi mengenai komunikasi politik. Salah satu definisi yang paling sering dikutip yaitu dari Dan Nimmo. Bagi Nimmo, komunikasi tidak sekedar meneruskan informasi dari komunikator kepada komunikan. Penyampaian pesan dan informasi lebih mudah dipahami jika disampaikan dalam bentuk simbol, slogan dan tema pokok. (Parwati & Istiningdiah, 2021)

Sementara itu, *term* politik bagi Nimmo adalah tentang siapa memperoleh apa, kapan waktunya dan bagaimana caranya. Dari pengertian tersebut, komunikasi politik bisa didefinisikan sebagai proses penyampaian informasi dengan memanfaatkan simbol, slogan dan tema pokok untuk memperoleh apa yang diinginkan, pada momentum yang telah ditentukan dengan cara serta strategi yang telah ditentukan. Nimmo memberi batasan terkait komunikasi politik. Baginya, konsekuensi aktual dan potensial merupakan landasan atau dasar dalam komunikasi politik.

Harold Laswell, pada tahun 1927, mengumumkan hasil risetnya mengenai propaganda politik. Riset ini merupakan disertasi dan dituangkan dalam artikel *The American Political Science Review*. Dalam hasil risetnya, Laswell menyampaikan bahwa komunikasi yang dilakukan melalui media massa (radio) ternyata mampu memberikan efek dan pengaruh terhadap persepsi individu mengenai perang. (Slamet, 2010)

Meskipun kajian komunikasi politik sudah dibahas lama oleh Harold Laswell dalam disertasi, namun kajian ini baru mulai banyak dibahas di Indonesia pasca peristiwa 1998. Reformasi menjadi gerbang perubahan bagi beberapa bidang di Indonesia, termasuk dalam keilmuan komunikasi. Pemerintah semakin terbuka serta memberi keleluasaan bagi masyarakat dalam hal kajian ilmu. Kondisi pemerintahan sebelum era reformasi tidak memungkinkan untuk melakukan banyak kajian dan riset dalam bidang komunikasi politik. (Frances L. Starmer, 1964)

Pada masa Orde Baru, partai politik yang berfungsi sebagai oposisi seperti sudah didesain. Begitupun dengan partai politik pemenang dalam pemilu yang suara pemilih tertingginya selalu diraih oleh Partai Golkar. Meskipun secara formalitas, negara Indonesia menggunakan sistem demokrasi, namun dalam tataran prakteknya sangat jauh dari definisi dan makna demokrasi itu sendiri.

Tidak jauh berbeda dari Orde Baru, pada masa sebelumnya yaitu Orde Lama, kondisi Indonesia masih belum memungkinkan untuk banyak melakukan kajian dalam bidang komunikasi politik. Kajian ini masih dianggap belum terlalu penting untuk didalami. Menurut Alwi Dahlan (1989), pada masa Orde Lama dan Orde Baru, komunikasi politik belum dianggap perlu untuk ditelaah secara utuh.

Komunikasi politik di Indonesia hari ini sudah memasuki era baru seiring dengan semakin berkembangnya media digital. Politisi sudah mulai meninggalkan sebagian cara konvensional dan beralih menggunakan media sebagai alat berkomunikasi dengan konstituen. Sebagian politisi menggunakan akun media sosial pribadi untuk menyapa konstituennya. Komunikasi politik dengan konten dalam media sosial ditata sedemikian mungkin agar menciptakan citra atau *image* yang sejak awal sudah direncanakan oleh politisi dan timnya.

Menurut Evie Ariadne dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa rata-rata konstituen lebih mempertimbangkan kualitas individu dari politisi daripada partai politik yang mengusungnya. Kualitas tersebut meliputi: karakter, rekam jejak kiprah politik, prestasi serta cara pendekatannya terhadap masyarakat. Poin-poin tersebut menjadi penilaian yang diutamakan. (Ariadne, 2018)

Hal ini diperkuat dengan semakin banyak lembaga survey independen yang juga berprofesi sebagai konsultan komunikasi politik. Dengan kondisi ini, tren arah kajian komunikasi politik di Indonesia adalah kuantitatif-positivistik. (Slamet, 2010) Politisi membutuhkan tolak ukur yang jelas atas kegiatan marketing politik yang dilakukannya. Mereka yang terjun dalam politik praktis, membutuhkan alat pengukur yang tepat untuk memprediksi capaian efek dan pengaruh aktivitas politik. Hal ini penting karena terkait dengan target capaian suara yang diinginkan oleh politisi.

Sementara itu, permasalahan kesenjangan gender dalam keterlibatan politik masih terjadi hingga sekarang. Rendahnya partisipasi perempuan menyebabkan masih banyak kebijakan yang belum berpihak pada perempuan. Perempuan masih menjadi warga 'kelas dua' dalam hal keterlibatan pembuatan kebijakan publik. Padahal, kebijakan-kebijakan ramah perempuan membutuhkan sudut pandang yang biasanya muncul dari pengalaman perempuan.

Kiprah Perempuan dalam Politik

Merujuk dari hasil riset yang dilakukan oleh Nina Andriana, dkk dari LIPI menyebutkan bahwa masalah utama dari rendahnya angka representasi perempuan dalam politik praktis merupakan wujud ketidakmampuan partai politik baik tingkat pusat maupun daerah untuk melakukan perekrutan terhadap kader-kader perempuan yang potensial. Ditambah, partai politik belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam regulasi internalnya. (Andriana et al., 2012)

Perempuan dan laki-laki mempunyai perbedaan kebutuhan. Sehingga diperlukan angka keseimbangan atas keterwakilan perempuan dalam lembaga yang mempunyai ranah untuk mengambil kebijakan publik. Dengan begitu, perempuan bisa mempunyai kekuatan mempengaruhi suara kebijakan dalam proses pengambilan keputusan baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. (Nurussa'adah, 2020)

Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini, yang mencapai 260 juta jiwa dengan separuhnya adalah perempuan, keterwakilan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih sangat minim. Hanya terdapat 120 perempuan dari 575 anggota DPR yang ada. (Admin, 2019b) Laki-laki mendominasi ruang politik yang menjadi penentu arah kebijakan di negara ini. Hal ini dibuktikan dengan data 14 kali hasil pemilu yang digelar di Indonesia masih menunjukkan angka kritis bagi keterwakilan perempuan. (Tridewiyanti, 2012) Sehingga wajar, jika beberapa kebijakan yang berpihak terhadap

perempuan justru mengalami kesulitan untuk diwujudkan, misal, terkait pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Ketenagakerjaan.

Dalam sisi pandang kemanusiaan, perempuan dengan segala keterbatasannya dalam lingkup lingkungan kerja, harus mendapat dukungan yang penuh dalam bentuk kebijakan yang berpihak. Perempuan mengalami nyeri menstruasi, kehamilan hingga melahirkan, rangkaian siklus yang tidak dialami oleh laki-laki. Idealnya, negara mendorong munculnya kebijakan yang mengakomodasi perempuan untuk bisa mencapai karir tertingginya di lingkungan kerja dengan rangkaian siklus yang dialaminya.

Kondisi tersebut melahirkan stereotipe atas perempuan terkait dengan pekerjaan domestik rumah tangga. Dalam artikel jurnal yang ditulis oleh Toril Aalberg dan Anders Todal Jessen pada tahun 2007 di Norwegia memperlihatkan ada persepsi yang berkembang di masyarakat mengenai perbedaan politisi laki-laki dan politisi perempuan. Pria diyakini lebih mampu mengurus hal-hal teknis terkait masalah pajak, bisnis dan banyak hal lain yang berkaitan dengan kebijakan. Sementara politisi perempuan diyakini hanya fokus terhadap kesejahteraan masyarakat. Inilah kenapa, masyarakat Norwegia lebih memilih politisi laki-laki daripada politisi perempuan. (Aalberg & Jessen, 2007)

Yang dituliskan oleh Aalberg dan Jessen senada dengan apa yang disampaikan oleh politisi perempuan dari Jawa Timur, Khofifah ndar Parawansa mengenai faktor yang mempengaruhi pola seleksi perempuan dan laki-laki dalam lembaga legislatif di Indonesia. Yang pertama, faktor budaya patriarkiyang masih melekat di Indonesia. Faktor yang kedua, proses seleksi internal partai politik, dan yang ketiga adalah peran media yang membentuk citra diri perempuan politisi. (Nimrah dan Sakaria et al., 2015)

Sebuah opini yang masih berkembang hingga saat ini, politik praktis merupakan wilayah maskulin. Sengitnya pertarungan politik pada level Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) hingga level Pemilihan Legislatif (Pileg) kerap tidak ramah terhadap perempuan (Siti Nurul Hidayah, 2020). Perempuan dalam politik praktis kerap dijadikan objek. Media hingga masyarakat dianggap masih belum bisa melihat perempuan yang terjun dalam politik sebagai subjek seutuhnya. Misal, perempuan politisi yang berprestasi atau mempunyai ide yang bagus, justru lebih disorot mengenai kecantikannya, cara berpakaian hingga *lifestyle* yang dilakukannya.

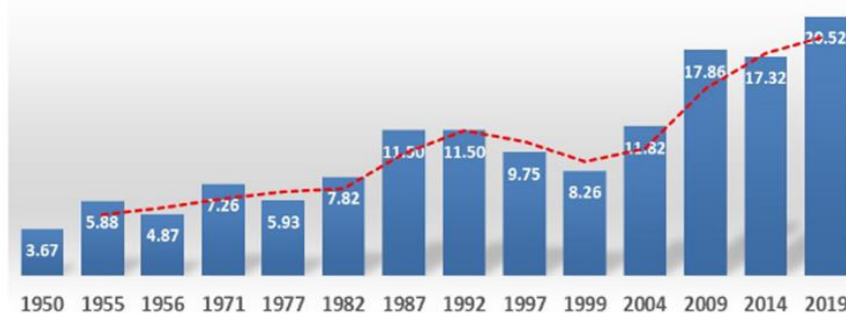
Bahkan, serangan politik yang ditujukan pada mereka juga biasanya terkait identitas keperempuanannya. Ini berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat terhadap hal yang lebih substansial seperti program kerja, integritas, hingga nilai-nilai yang diperjuangkan. Mansour Faqih

mengklasifikasikan bentuk ketidakadilan gender menjadi lima, yaitu, marginalisasi (pemiskinan), subordinasi, pelabelan negatif, kekerasan, dan beban ganda (*double burden*). Pandangannya ini tertuang dalam buku *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* yang ditulisnya pada tahun 2003. (Siti Nurul Hidayah, 2020)

Pada tahun 1995, PBB merilis sebuah laporan yang menganalisis mengenai korelasi gender dan pembangunan di 174 negara. Hasil laporan PBB itu menyatakan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang nyata antara tingkat partisipasi perempuan dalam aktivitas politik pada lembaga maupun intensi pemerintah tetapi angka 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dinilai sebagai angka minimal ideal untuk memberi pengaruh dan warna dalam politik. (Parwati & Istiningdiah, 2021)

Grafik 1

Keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif dari pemilu 1950-2019



Sumber : bagan diolah dari berbagai sumber (Parwati & Istiningdiah, 2021)

Dari bagan tersebut, tampak bahwa keterwakilan perempuan di lembaga DPR dari 1950-2019 belum ada kenaikan angka yang signifikan. Selama 69 tahun, angka tertinggi keterwakilan perempuan hanya bisa mencapai di angka 20.5% dari total anggota DPR yang ada. Bahkan, pada masa Orde Lama, keterwakilan perempuan sangat rendah, hanya dikisaran angka 3-4%.

Awal masa reformasi, jumlah perempuan di legislatif sempat mengalami penurunan di angka 8,26%. Namun setelahnya, angka persentase perempuan di legislative cenderung mengalami kenaikan. Rekor tertinggi masih terjadi pada pemilu 2019. Namun, itupun belum sesuai angka kritis yang disampaikan PBB dalam laporannya pada tahun 1995. Idealnya, ada 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif untuk mendukung arah kebijakan negara agar tidak cenderung mengedepankan nalar maskulinitas.

Pemaksaan kuota 30% bagi perempuan kadang juga menimbulkan dilematis. Pada satu sisi, keputusan pemberian afirmasi terhadap keterlibatan perempuan mempunyai niat dan tujuan supaya semakin banyak perempuan yang mau terjun dalam pusaran politik praktis. Namun, disisi lain, kebijakan ini rentan dimanfaatkan oleh oligarki politik yang berangkat dari kekeluargaan. Ada kecenderungan, politisi laki-laki mengajukan istri atau anak perempuannya untuk mengisi kuota yang ada. Sehingga, suara dan ide kemungkinan masih dipengaruhi oleh laki-laki yang berada dibelakang layar.

Namun, dengan segala celah kelemahannya, kebijakan afirmasi 30% pada tahun 2003 melalui UU no 12 tahun 2003 tentang pemilu DPR, DPD dan DPRD Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi "*Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%*", dinilai sebagai salah satu cara untuk bisa meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di legislatif.

Hal yang perlu dimiliki oleh perempuan politisi adalah kemampuan yang bagus dan negosiasi dan lobi. Negosiasi menurut Nugroho adalah perangkat teknis dari komunikasi praktis. Dalam unsur-unsur dari lobi mencerminkan karakter komunikasi. Negosiasi dimaknai sebagai proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak. (Ramadhani et al., 2022). Negosiasi juga biasa digunakan untuk melakukan pendekatan terhadap konflik karena bertujuan untuk mengurangi perbedaan bisa dan berakhir dengan sebuah kesepakatan. (Ardianto et al., 2020)

Dalam politik praktis, kegiatan-kegiatan komunikasi yang dilakukan akan sangat dekat dengan negosiasi. Semisal, dalam penentuan kandidat calon politisi yang akan diajukan oleh partai untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Seorang politisi yang baik akan dibarengi dengan kemampuan negosiasi yang bagus, karena dibutuhkan kemampuan bernego untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan bagi para politisi. Padahal, mereka yang menentukan atau mendominasi dalam negosiasi juga butuh mendapatkan keuntungan. Disini, kemampuan nego kedua belah pihak akan diuji bagaimana untuk mendapatkan deal-deal yang menguntungkan masing-masing pihak.

Sementara itu, lobi atau representasi kepentingan terkait erat dengan politisi atau otoritas administratif yang menyasar pada kelompok tertentu. Lobi bertujuan untuk mendapatkan pengaruh pada keputusan-keputusan tertentu. Lobi bisa dinilai berhasil jika perencanaan sejak awal sudah tercatat dengan

rinci tahapan-tahapannya serta dilakukan oleh orang yang ulung dalam perlobian. (Joos, 2011)

Sama halnya dengan negosiasi, seorang yang melakukan lobi harus selektif memilih individu yang dilobi. Tidak semua orang bisa dilobi. Jikapun bisa dilobi, belum tentu orang tersebut memiliki kriteria sebagai orang yang layak dilobi. Orang yang dilobi setidaknya mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan.

Seorang pelobi harus memastikan bahwa orang yang di lobi bisa mendominasi, mengarahkan diskusi, dan memiliki minat pada isu yang sedang dibahas. Dalam proses lobi, informasi merupakan sebuah kekuatan. Pelobi paling efektif kerap kali merupakan orang dengan kemampuan wawasan dan pengetahuan yang bagus dalam yang memberikan informasi. (Grunig, J., & Hunt, 1984)

Menurut Ardianto, dalam konteks komunikasi politik, lobi politik sebaiknya dilakukan secara face to face dan door to door. Lobi membutuhkan ruang personal agar terjadi dialog dan kompromi hingga tujuan mempersuasi bisa tercapai. Komunikasi politik bisa dilakukan mulai dari percakapan telepon, chatting, dan berujung dengan pertemuan tatap muka. Bahasa dan gaya dalam berkomunikasi juga harus diperhatikan agar lobi ini bisa berkelanjutan. (Ramadhani et al., 2022)

Politisi Perempuan di Kediri

Kota Kediri dan Kabupaten Kediri merupakan 2 wilayah yang berdekatan namun mempunyai luas wilayah yang jauh berbeda. Kota Kediri hanya mempunyai luas wilayah sekitar 63,404 km² dengan 3 kecamatan didalamnya, yaitu Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Mojoroto. (Admin, 2019a) Wilayah yang tidak terlalu luas ini, kemungkinan juga akan berpengaruh pada bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para politisi. Untuk lebih detail terkait pembagian wilayah Kota Kediri, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Kecamatan dan Desa di Kota Kediri

Kode	Kecamatan/Kelurahan Kec Kota	Luas /km ²	Kecamatan/Kelurahan Kec Pesantren	Luas /km ²	Kecamatan/Kelurahan Kec Mojoroto	Luas /km ²
001	Manisrenggo	1,764	Blabak	3,354	Pojok	5,153
002	Rejomulyo	1,670	Bawang	3,449	Campurejo	1,409
003	Ngronggo	2,585	Betet	1,691	Tamanan	1,077

004	Kaliombo	0,958	Tosaren	1,361	Banjarmali	0,954
005	Kampungdalem	0,332	Banaran	0,974	Bandar Kidul	1,299
006	Setonopande	0,383	Ngletih	1,237	Lirboyo	1,037
007	Ringinanom	0,050	Tempurejo	1,864	Bandar Lor	1,113
008	Pakelan	0,214	Ketami	1,894	Mojoroto	2,130
009	Setonogedong	0,059	Pesantren	1,356	Sukorame	4,302
010	Kemasan	0,228	Bangsai	1,029	Bujel	1,590
011	Jagalan	0,043	Burengan	1,283	Ngampel	1,468
012	Banjaran	1,209	Tinalan	0,926	Gayam	1,296
013	Ngadirejo	1,470	Pakunden	1,024	Mrican	1,109
014	Dandangan	1,100	Singonegaran	0,99	Dermo	0,657
015	Balowerti	0,830	Jamsaren	1,42		
016	Pocanan	0,214				

Sumber : bagan diolah dari web kota kediri dan Wikipedia

Saat ini, Kota Kediri mempunyai 30 anggota legislatif yang berangkat dari 3 daerah pemilihan (dapil) sesuai jumlah kecamatan yang ada di Kota Kediri. Sementara, terdapat 10 partai politik yang ada di legislatif. Meskipun begitu, belum ada data yang spesifik dalam website dprd kota dan kabupaten Kediri mengenai jumlah keterwakilan perempuan dalam kursi legislative. Berikut tabel data terkait legislatif di Kota Kediri:

Tabel 2
Dapil Kota Kediri

Nama Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Kota Kediri 1	Kota	9
Kota Kediri 2	Pesantren	9
Kota Kediri 3	Mojoroto	12
Total		30

Sumber : bagan diolah dari web kota kediri dan Wikipedia

Tabel 3
Perolehan Kursi DPRD Kota Kediri

Partai Politik	Jumlah kursi dalam periode	
	2014-2019	2019-2024
PKB	4	3
Gerindra	3	4
PDI-P	4	5
Golkar	3	2
Nasdem	1	3

PKS	3	2
PPP	2	1
PAN	6	5
Hanura	2	2
Demokrat	2	3
Jumlah Anggota	30	30
Jumlah Partai	10	10

Tabel 4
Pimpinan DPRD Kota Kediri

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	Agus Sunoto Iman	PDI-P
2	Wakil Ketua I	Firdaus	PAN
3	Wakil Ketua II	Katino	Gerindra

Sumber: Wikipedia (*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, 2022*)

Meskipun, terdapat pondok pesantren Lirboyo yang terletak di Kota Kediri, namun jumlah pemilih partai politik tertinggi masih diraih oleh PDI-Perjuangan. Sementara PKB jumlah kursinya setara dengan partai Nasdem dan partai Demokrat. Sehingga, jabatan ketua DPRD dipegang oleh PDI-Perjuangan yaitu Agus Sunoto Iman, yang merupakan saudara ipar dari Sekjen PDI-Perjuangan, Pramono Anung.

Kondisi tidak jauh berbeda ditunjukkan oleh Kabupaten Kediri yang memiliki luas wilayah 1.523,97 km² dengan 26 kecamatan. Berikut daftar kecamatan sekaligus desa di Kabupaten Kediri:

Tabel 5
Jumlah Kecamatan dan Desa di Kabupaten Kediri

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Semen	12
2	Mojo	20
3	Kras	16
4	Ngadiluwih	16
5	Kandat	12
6	Wates	18
7	Ngancar	10
8	Puncu	8
9	Plosoklaten	15

10	Gurah	21
11	Pagu	13
12	Gampengrejo	11
13	Grogol	9
14	Papar	17
15	Purwoasri	23
16	Plemahan	17
17	Pare	8
18	Kepung	10
19	Kandangan	12
20	Tarokan	10
21	Kunjang	12
22	Banyakan	9
23	Ringinrejo	11
24	Kayenkidul	12
25	Ngasem	12
26	Badas	8
Total		343

Sumber : Wikipedia(*Kabupaten Kediri*, 2022)

Sama seperti halnya Kota Kediri, tidak ada info yang menjelaskan tentang total jumlah keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif baik di web maupun berita. Namun, Kabupaten Kediri sudah 2 kali mempunyai pimpinan eksekutif dari perempuan politisi. Yang pertama adalah Haryanti Sutrisno yang menjabat sebagai Bupati Kediri selama 2 periode.

Haryanti Sutrisno merupakan istri dari Bupati 2 periode, yaitu H. Sutrisno yang menjabat sebagai Bupati Kediri sejak 1999 hingga 2009. Jika ditotal, keseluruhan waktu jabatan keluarga sebagai kepala daerah adalah 20 tahun. Kepemimpinan Haryanti Sutrisno digantikan oleh Hanindhito Himawan Pramana yang merupakan putra sulung dari politisi senior PDI-Perjuangan, Pramono Anung. Dhito, begitu dia biasa disapa, didampingi oleh Dewi Mariya Ulfa yang saat itu merupakan Ketua Umum PC. Fatayat NU Kabupaten Kediri. Dewi bukan berasal dari keluarga politisi. Selama ini, dia membangun jejaringnya melalui kegiatan Fatayat NU. Pasangan Dhito dan Dewi terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kediri masa jabatan 2021-2024.

Sementara itu, pada jajaran pimpinan DPRD Kabupaten Kediri tidak ada satupun keterwakilan perempuan. Semua pimpinan adalah laki-laki. Berikut daftar pimpinan serta komposisi anggota DPRD Kabupaten Kediri periode 2019-2024:

Tabel 6
Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Kediri

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode	
	2014-2019	2019-2024
<u>PKB</u>	9	9
Gerindra	6	5
PDI-P	12	15
Golkar	5	6
Nasdem	5	4
PKS	1	1
PPP	1	2
PAN	6	5
Demokrat	4	3
PBB	1	0
Jumlah Anggota	50	50
Jumlah Partai	10	9

Tabel 7
Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri

No	Nama	Jabatan	Partai Politik
1	Dodi Purwanto	Ketua	PDI-P
2	S. Djamaluddin	Wakil Ketua I	PKB
3	Sigit Sosiawan	Wakil Ketua II	Partai Golkar
4	Muhaimin	Wakil Ketua III	PAN

Sumber: Wikipedia(*Kabupaten Kediri*, 2022)

Informan penelitian ini dikelompokkan menjadi 2, yakni politisi perempuan di lembaga legislatif di Kota Kediri dan politisi perempuan di lembaga eksekutif di Kabupaten Kediri. Adapun total informan dalam penelitian ini adalah 2 orang, terdiri dari Wakil Ketua DPRD Kota Kediri dan

Wakil Bupati Kabupaten Kediri. Berikut peneliti paparkan identitas informan yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini.

Salah satu politisi perempuan di lembaga legislatif di Kota Kediri adalah Dra. Hj. Firdaus. Sebelum memutuskan terjun ke politik praktis, Firdaus mempelajari banyak hal terkait APBD. Hal ini bertujuan agar bisa mendukung program-program dari walikota yang menggunakan dana APBD, seperti yang beliau kemukakan dalam wawancara yang kami lakukan terkait awal mula bagaimana Firdaus bisa terjun di politik praktis seperti saat ini.

“Setelah, apa namanya, mempelajari APBD gitu, ternyata bahwa APBD setelah ceblung di ww (wakil walikota) itu kan, setelah mempelajari APBD ternyata APBD bisa diberikan ke masyarakat itu secara maksimal. Jadi, tidak harus dikelolasecara besar-besaran oleh dinas-dinas. Namun, kalau secara mandatory pasti ya itu, karena sudah sebagai acuan yang tidak bisa tidak harus dilakukan gitu. Jadi, setelah jadi ww tersebut, terus keinginannya untuk menjadi AG 1. Nah, pemikiran kami itu kan distu berarti kita harus punya orang-orang yang bisa mendukung setiap program-program yang ada. Karena program yang bagus, tanpa ada dukungan yang luar biasa itu pasti kurang bisa terealisasi”.

Data di atas menunjukkan bahwa keberadaan Firdaus di legislatif merupakan satu rangkaian dari rencana Abu Bakar (yang saat itu ingin mencalonkan diri sebagai walikota Kediri). Dalam musyawarah keluarga besar yang mereka lakukan, diputuskan Firdaus untuk maju dalam kontestasi legislatif Kota Kediri.

Ketika memutuskan hal tersebut, Firdaus mengaku tidak punya gerakan untuk orang-orang agar mendukungnya. Hal ini dikarenakan, meskipun lahir di Kediri, namun Firdaus sudah sejak lama berdomisili di Yogyakarta. Padahal, untuk orang-orang agar mau mendukung dia, diperlukan adanya gerakan yang kira-kira bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Firdaus memulai pendekatan dengan masuk ke perkumpulan arisan, perkumpulan kebaktian. Menurut Firdaus, dia harus masuk ke semua jenjang keseluruhan agama apapun. Meskipun PAN merupakan partai religi, namun Firdaus menjelaskan bahwa religi yang dianut PAN tidak terpatok hanya pada satu agama. Sehingga, usaha mendekati konstituen dari agama selain islam juga harus dilakukan.

Firdaus melakukan semua ini sejak 2 tahun sebelum masa pencalonan. Beliau melakukannya secara *door to door* dari rumah masyarakat ke masyarakat. Bentuk komunikasi eksternal yang dilakukannya adalah dengan melakukan kegiatan yang menyentuh langsung ke masyarakat bawah. Dalam kegiatan di rumah-rumah, Firdaus mengaku menyiapkan kue atau camilan untuk warga yang ditemuinya. Jika, tidak berupa snack, maka Firdaus akan memberikan

uang untuk kegiatan tersebut agar dimasukkan ke uang kas. Uang bantuan penyediaan sncak tersebut tidak pernah diberikannya ke RT/RW.

Respon yang diterimanya sangat bagus, menurutnya hal itu kemungkinan karena pada saat itu masih jarang legislatif yang turba (turun ke bawah) dengan langsung *door to door* ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan baik itu arisan ataupun ibadah kebaktian di rumah. Ini dikarenakan, gerakan turba yang dilakukan Firdaus memang jauh hari dimulainya, yaitu 2 tahun sebelum beliau mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kota Kediri.

Salah satu strategi komunikasi yang dilakukan Firdaus untuk mendekati masyarakat adalah dengan menyiapkan panggilan khusus yang dirasanya bisa membuat lebih dekat dan tak berjarak dengan calon konstituennya. Nama yang dimunculkannya adalah Ido. Orang-orang terbiasa memanggilnya Mbak Ido atau Kak Ido. Nama panggilan tersebut masih dipertahankannya sampai sekarang.

Menurut Firdaus, jika orang ingin menjadi legislatif, dia harus mau turun ke bawah. Kesediaan untuk turun langsung ke masyarakat bisa membantu untuk membangun hubungan dan relasi yang baik. Baginya, seorang legislatif butuh untuk banyak mendengar suara aspirasi dari masyarakat karena yang terhormat sebenarnya adalah warga/masyarakat bukan anggota dewan.

Sementara, dalam komunikasi internal (baik bersifat keluarga besar maupun partai politik karena Ketua DPD PAN merupakan kakak kandungnya), semua keputusan selalu dilakukan dengan rembug keluarga. Meskipun begitu, Firdaus mengaku jika dibilang keluarganya dekat dengan politik, tidak juga. Namun, dibilang jauh, juga tidak.

“Tapi gini, kalau dibilang endak, bapak saya itu adalah termasuk orang masyumi. Eee.. terus kemudian, kami-kami ini harus masuk kedalam organisasi. Saya juga masuk ke Nasiyatul Aisyah. Terus, kakak saya, mamanya mas Abu itu, juga sebagai anggota Aisyah dan aktif. Dan di organisasi perkampungan ini, kami juga aktif.”

Firdaus menyatakan bahwa kehidupan ini penuh dengan politik. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan *win-win solution* untuk semua pihak, dan ini harus mau tidak mau menggunakan jalur politik. Jadi, meskipun sebelumnya tidak terlibat dalam politik praktis, namun prinsip-prinsip sosial kemasyarakatan dan organisasi yang ditanamkan oleh keluarga mengarah kepada kebermanfaatan untuk masyarakat melalui berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi.

Selain ibu Dra. Hj. Firdaus, ada politisi perempuan yang enerjik yaitu Hj. Dewi Mariya Ulfa, ST. Ia merupakan wakil bupati termuda selama sejarah kepemimpinan bupati di Kabupaten Kediri. Dilantik sebagai wakil bupati

periode 2021-2024, dia mengawali karir organisasinya ketika bergabung dengan IPPNU sejak tahun 2000 hingga 2012 dan sempat masuk dalam kepengurusan di tingkat pusat. Perempuan kelahiran 1980 ini mengaku awalnya terpaksa ikut.

“Baru pas saya liburan semester 1, itu kuliah, pulang, itu ada temen-temen itu jaman TPQ, ngajak ikut Lakmud. Nah, pas lakmud, kalau saya ikut, mereka ikut. Kalau ga ikut, mereka ga ikut. Yowes terpaksa ikut. Tapi berawal dari keterpaksaan itu ternyata saya malah aktif di organisasi. Cinta lah. Intinya begitu ya.”

Dewi mengaku justru tidak tertarik untuk aktif di organisasi mahasiswa seperti HMI atau PMII. Dia menikmati aktif di IPPNU. Organisasi itu dirintisnya sejak ranting hingga akhirnya menjadi Pengurus Pusat pada masa ketua umum Anggia Ermarini. Beliau menuturkan, tantangan berkomunikasi dengan konstituen NU tidaklah mudah, hal ini dikarenakan latar belakang orang NU sangat beragam mulai dari pendidikan hingga ekonomi. Sehingga, bergaul dengan konstituen NU memang harus mempunyai sensitivitas yang tinggi.

Berkomunikasi dengan masyarakat NU merupakan tantangan bagi Dewi yang sebelumnya merupakan pegawai bank. Jika sebelumnya, hanya fokus pada penghitungan uang, namun berinteraksi serta bersentuhan dengan masyarakat ternyata lebih menyenangkan baginya. Meskipun, terkadang melakukan perbuatan A yang menurutnya baik, namun ternyata menurut masyarakat ternyata tidak baik.

“Ketika di bank, terbiasa dengan organisasi. Bahkan, apa ya...jadi prioritas. Jadi, masuk PW (IPPNU) pun, pulang, setiap sabtu minggu juga ke Surabaya, keliling Jawa Timur. Pas jadi pengurus wilayah ataupun pusat. Karena saya pas di PW itu juga bidang organisasi. Kalo pas di Pusat, sekretaris.”

Dewi baru menemukan bahwa passionnya di organisasi sejak aktif di IPPNU dan menikmati pertemuan dengan kawan-kawannya di organisasi. Bertemu dengan banyak orang dan banyak karakter menurutnya hal yang menarik. Meskipun jika bertemu banyak orang, akan semakin bertemu dengan banyak masalah.

Berawal dari aktivitas-aktivitasnya di NU inilah yang mendatangkan tawaran kepada Dewi untuk maju dalam kontestasi pilkada. Dewi mengaku mendapat perintah untuk maju sebagai wakil calon bupati dan diminta menyiapkan berkas. Proses pemilihannya sangat cepat.

“Saya tidak dikasih kesempatan untuk mau atau enggak. Tapi, kamu harus berangkat. Jadi, saya sampek Ya Allah, ini saya 2 minggu ga bisa, ga doyan maem,

ga bisa tidur. Bingung saya. Ini bagaimana. Ini nanti pasti rame. Saya sudah memprediksi ini”.

Panggung politik yang keras memaksa Dewi untuk belajar bertahan secara mental. Ketika memutuskan untuk mengikuti arahan senior, beliau memantapkan hati untuk terus tatag. Dewi mengaku menerima banyak penolakan, bahkan ada suara-suara yang mengatakan bahwa dia hanya diperalat. Begitupun ketika melakukan konsolidasi dan sowan-sowan ke para Kyai, banyak yang tidak percaya bahwa dia yang diberangkatan sebagai calon wakil bupati.

Namun, pengalaman bentrok dan gesekan selama aktif di organisasi membantunya untuk beradaptasi dengan kondisi kontestasi politik yang memang keras. Baginya, jika terjun ke politik memang harus mempunyai mental *ndableg*. Salah satu yang mempunyai peranan penting dalam proses pemilihan namanya adalah Halim Iskandar yang menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Dalam proses kampanye pilkada, Dewi melakukan komunikasi internal baik ke para Kyai maupun para petinggi Partai Kebangkitan Bangsa. Menurutnya, menjadi politisi artinya menyerakan waktunya selama 24 jam. Jadi, jam berapapun dipanggil untuk sowan, dia harus siap. Bahkan, jika harus dipanggil ke luar kota sekalipun.

Halim Iskandar dan Anggia Ermarini beberapa kali disebut oleh Dewi dalam wawancara yang kami lakukan. Dari cerita yang disampaikan, kedua nama tersebut mempunyai posisi penting dan penentu dalam langkah Dewi maju sebagai calon wakil bupati Kediri bahkan hingga terpilih. Aktivitas komunikasi dua politisi perempuan di Kediri dapat digambarkan matriks sebagai berikut:

Tabel 8
Matrik Komunikasi Politik Perempuan Politisi

NO	Bentuk Komunikasi	Komunikasi Internal	Komunikasi Eksternal
1	Langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi panggilan konsolidasi internal yang dilakukan oleh partai politik. - Rapat dengan keluarga besar yang sama-sama terjun dalam dunia politik. - Melakukan konsolidasi dengan petinggi partai agar solid dan satu komando - Melakukan lobi dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Door to door ke rumah masyarakat - Turun ke bawah mengikuti kegiatan masyarakat yang dilakukan di rumah seperti arisan atau ibadah - Keliling turba ke konstituendi daerah melalui aktivitas organisasi

		negosiasi internal partai atau fraksi terkait kebijakan yang akan diputuskan.	- Melakukan kegiatan sowan kepada tokoh agama/pemuka agama/pemuka desa/tokoh masyarakat
2	Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan aktivitas lobi dan negosiasi dengan petinggi partai di Jakarta (pusat) untuk turunnya surat rekomendasi keberangkatan kandidat dalam kontestasi pilkada. - Menggunakan jalur politisi laki-laki untuk melobi ke internal parpol di pusat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi bantuan kepada warga melalui tim. - Memberikan pernyataan melalui pesan atau surat. - Memberikan arahan melalui koordinator-koordinator masyarakat.

Sumber : Hasil Wawancara

Menurut Philips J Vermonte dari Center For Strategic and International Studies (CSIS) menilai bahwa ada kendala dalam relasi antara legislator dengan konstituen, antara lain:

1. Anggota DPR/DPRD mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan konstituen. Ini dikarenakan adanya pandangan dan budaya transaksional, seperti meminta imbalan.
2. Tidak semua anggota DPR mempunyai program konkrit yang dibutuhkan masyarakat.
3. Terjadi hubungan yang bersifat satu arah. Hal ini dikarenakan, biasanya DPR/DPRD memiliki sarana dan mekanisme tertentu untuk menemui konstituen. Sedangkan, konstituen kadang juga kesulitan menemui langsung wakil rakyatnya karena kesibukan yang tinggi.
4. Realitas persaingan sesama anggota DPR/DPRD dari partai yang sama. Ini bisa mengakibatkan anggota DPR/DPRD kurang fokus kepada konstituennya karena sibuk mengurus konflik internal di partainya.
5. Kendala geografis (Aja Syahri, 2020)

Sementara itu, terdapat 4 asumsi dalam hubungan Teori *Standpoint* dengan pola komunikasi para politisi perempuan di Kediri dapat digambarkan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel 9

Teori Standpoint dan Komunikasi Politik Politisi Perempuan di Kediri

No	Asumsi Teori Standpoint	Deskripsi Interpretatif Data Lapangan
1	Pengetahuan merupakan produk dari kegiatan sosial sehingga tidak ada pengetahuan yang bersifat objektif	Pengetahuan masyarakat mengenai citra diri perempuan di internal partai politik dan masyarakat masih kentara diwarnai oleh pengetahuan agama yang menempatkan perempuan sebagai

		'makmum', bukan imam. Hal ini juga menjadi jalan terjal yang dilalui oleh Hj. Dewi Marya Ulfa dan Hj. Firdaus untuk meyakinkan kepada partai politik dan masyarakat bahwa mereka mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam kepemimpinan politik.
2	Kondisi budaya disekeliling kehidupan wanita akan menghasilkan pengalaman dan pemahaman yang menimbulkan perbedaan pola komunikasi.	Budaya patriarki yang mengakar di sebagian besar masyarakat Indonesia terkait peran domestik dan publik bagi perempuan juga mudah ditemui di Kediri. Budaya ini mewarnai cara pandang terhadap kepemimpinan perempuan.
3	Pemahaman terhadap perbedaan pola komunikasi dan pengalaman wanita akan berguna untuk memahami ciri khasnya.	Politisi perempuan mempunyai pola komunikais yang berbeda dengan politisi laki-laki. Laki-laki mempunyai kecenderungan mendominasi peran komunikasi internal dalam partai politik, namun politisi perempuan tetap dituntut mempunyai skill komunikasi yang bagus kepada konstituen.
4	Kita bisa memahami pengalaman wanita dengan melihat interpretasi orang akan pengalaman mereka.	Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa konstituen yang mempercayakan keterwakilan mereka kepada Hj Dewi Marya Ulfa dan Hj Firdaus menganggap perempuan-perempuan ini sebagai politisi yang bisa mewakili mereka di kursi pemerintahan. Rasa percaya tersebut diwujudkan dengan memberikan suara kepada mereka saat pencoblosan di Pemilu dan Pilkada.

Sumber : Hasil Wawancara

Dari data-data lapangan tersebut, terlihat bahwa aktivitas komunikasi politik yang dilakukan oleh para politisi melibatkan kegiatan negosiasi dan lobi dalam membuat kesepakatan-kesepakatan baik ke dalam internal partai politik maupun yang bersifat eksternal yaitu ke konstituen dan masyarakat umum. Politisi perempuan juga dituntut untuk mempunyai kemampuan di dua aspek tersebut.

KESIMPULAN

Berdasar data dan pembahasan dalam penelitian komunikasi politik perempuan politisi di kota dan kabupaten Kediri, maka dapat disimpulkan bahwa skill komunikasi politik yang meliputi lobi dan negosiasi dimiliki oleh politisi perempuan di Kediri. Kemampuan mereka dalam membangun relasi dan komunikasi yang baik akan menentukan keputusan-keputusan yang

menguntungkan untuk politisi perempuan. Strategi dalam komunikasi politik serta pemegang arahan masih dipegang oleh laki-laki. Pada konteks penelitian ini, terlihat pengaruh laki-laki masih dominan dalam penentuan strategi dan langkah-langkah politik, termasuk dalam lobi ke petinggi partai politik. Dalam hal ini, pengaruh Bagi masih besar dalam langkah-langkah politik yang diambil Firdaus. Demikian juga, ada peranan Halim Iskandar yang cukup besar dalam proses penentuan calon wakil bupati Kediri.

Selain itu, terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi perempuan di Kediri meliputi komunikasi internal, komunikasi eksternal yang pola dan aktivitasnya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : pengetahuan, budaya, pemahaman hingga interpretasi yang dimunculkan dalam proses komunikasi yang terjadi. Aspek-aspek yang mempengaruhi ini penting untuk dimunculkan karena dengan menggunakan kaca mata banyu sudut pandang, akan terlihat lebih jernih posisi politisi perempuan dalam proses komunikasi politik di internal partai dan eksternal ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aalberg, T., & Jenssen, A. T. (2007). Gender Stereotyping of Political Candidates. *Nordicom Review*, 28(1), 17–32. <https://doi.org/10.1515/nor-2017-0198>
- Admin. (2019a). *Geografi*. Wwww.Kedirikota.Go.Id.
- Admin. (2019b). *Tentang DPR*. <https://www.dpr.go.id/>.
- Aja Syahri, A. T. S. M. H. R. (2020). Efektivitas Komunikasi Politik PPP Dalam Menjalinkan Hubungan Dengan Konstituen Di Kota Medan. *MEDIALOG: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 208–226. <https://doi.org/10.35326/medialog.v3i2.787>
- Andriana, N., Yanuarti, S. N. S. S. H. S., & Amalia, A. P. B. L. S. (2012). *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*.
- Ardianto, A., Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 25–39. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10009>
- Ariadne, E. (2018). Konstruksi Makna Kandidat Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah Bagi Masyarakat Kota Bandung (Perspektif Komunikasi Politik). *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 87. <https://doi.org/10.24912/jk.v9i2.1068>
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri. (2022). Id.Wikipedia.Org.
- Dewi, K. H. (2007). Demokratisasi dan Dekonstruksi Ideologi Gender Orde Baru. *Jurnal Penelitian Politik*, 4(1), 59–68.

- Dewi, K. H., Kusumaningtyas, A. N., Ekawati, E., & Soebhan, S. R. (2018). Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 267-288. <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/765>
- Frances L. Starmer. (1964). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. *Journal of Southeast Asian History*, 5(2), 220-224.
- Grunig, J., & Hunt, T. (1984). *Managing Public Relations*. CBS College Publishing.
- JH Lotulung, L. (2018). Komunikasi Politik Legislator Perempuan (Studi Fenomenologi Legislator Perempuan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara). In *Disertasi* (Vol. 38, Issue 2, pp. 1-13).
- Joos, K. (2011). *Lobbying in The New Europe*. Wiley-VCH.
- Kabupaten Kediri. (2022). Id.Wikipedia.Org.
- Kantaprawira, R. (1977). *Sistem Politik Indonesia-Suatu Model Pengantar*. Tribisana Karya.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Littlejohn, S. W. and K. A. F. (2008). *Theories of Human Communication* (ninth edition). Thomson Wadsworth.
- Mohammad Zamroni. (2013). Perempuan Dalam Kajian Komunikasi Politik dan Gender. *Jurnal Dakwah*, XIV(1), 103-132.
- Nimrah dan Sakaria, S., Kunci, K., & Budaya Patriarki, dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 2407-9138.
- Nindito, S. (2013). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang Konstruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 2(1), 79-95. <https://doi.org/10.24002/jik.v2i1.254>
- Nurussa'adah, E. (2020). Perempuan dan Komunikasi Politik pada Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(1), 111. <https://doi.org/10.31315/jik.v18i1.3236>
- Parwati, T., & Istiningdiah, K. (2021). Partisipasi Dan Komunikasi Politik Perempuan Di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan Di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(2), 119-129. <https://doi.org/10.14710/interaksi.9.2.119-129>
- Ramadhani, S., Kustiawan, W., Nasution, J. H., & Azhari, M. I. (2022). Strategi Lobi Dan Negosiasi Dalam Proses Komunikasi Politik. *An Nadwah*, 28(1), 89-95. <https://doi.org/10.37064/nadwah.v28i1.12255>
- Siti Nurul Hidayah. (2020). Perempuan Politik dan Ketidakadilan Gender. *Detik.Com*, <https://news.detik.com/kolom/d-5175383/perempuan-p>.
- Slamet, A. (2010). *Sejarah dan Masa Depan Riset Komunikasi Politik 1*.
- Syafputri, E. (2017). Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan. *Global South Review*, 1(2), 165. <https://doi.org/10.22146/globalsouth.28839>
- Tridewiyanti, K. (2012). Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik “ Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif.”

Jurnal Legislasi Indonesia, 9(1), 73–90. http://www.bps.go.id/booklet/November_2011.pdf.

West, R. and L. H. Turner. (2010). *Introducing Communication Theory Analysis and Application* (fourth edition). McGraw-Hill International Edition.

www.kemenpppa.go.id. (2021). *Menteri Bintang Optimis Keterwakilan Perempuan di Legislatif capai 30 persen pada Pemilu 2024*. [Www.Kemenpppa.Go.Id](http://www.kemenpppa.go.id).

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3076/menteri-bintang-optimis-keterwakilan-perempuan-di-legislatif-capai-30-persen-pada-pemilu-2024>